

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 703 TLP/FAX. (0266) 226088 Sukabumi - 43169  
Email : [disnakertranskabsmi@yahoo.co](mailto:disnakertranskabsmi@yahoo.co)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban implementasi dari Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan rencana kerja tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan Akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi atau dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 31 Desember 2021  
Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**USMAN JAELANI, SH., MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001



## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Maksud dan Tujuan .....	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
I.4. Landasan Hukum.....	8
 <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	11
II.2. Perjanjian Kinerja .....	21
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2021 .....	29
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	36
III.2. Realisasi Anggaran .....	48
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
IV.1. Kesimpulan .....	51
IV.2. Rencana Tindak lanjut .....	52
 <b>BAB V LAMPIRAN</b>	



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah bidang Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian didasarkan atas kebutuhan yang memiliki fungsi : evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan Bidang Transmigrasi kelompok jabatan fungsional di lingkungan Disnakertrans.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber



daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Draft Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2021 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **I.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :



1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **I.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah :



### **I.3.1. Tugas Pokok**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **I.3.2. Fungsi**

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
4. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Transmigrasi, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
5. Penerbitan izin / Rekomendasi teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
7. Pembinaan Administrasi di lingkungan Dinas;
8. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.





### **I.3.3 Isu Strategis**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai aspek strategis dalam hal pembangunan ketenagakerjaan yang lokasinya tidak jauh dari ibukota Negara Republik Indonesia disamping itu juga dengan banyaknya investasi asing yang masuk seiring dengan perkembangan Kabupaten Sukabumi yang berkembang dari daerah agraris menjadi daerah industri. Dampak dari perkembangan tersebut semakin banyaknya kesempatan kerja bagi para pencari kerja, tetapi dengan adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkompetensi banyak yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadikan pencari kerja di wilayah Kabupaten Sukabumi harus siap bersaing dan berkompetisi dalam hal kompetensi dengan cara meningkatkan daya saing baik dari pendidikan dan keterampilan.

### **I.3.4. Struktur Organisasi**

#### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 103 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Susunan Organisasi dan Personil**

Susunan Organisasi Disnakertrans, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh :
  - a. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub. Bag Keuangan
  - c. Sub. Bag Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
  - a. Seksi Pelayanan Antar Kerja Dalam dan Luar Negeri
  - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja





- 
4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
    - a. Seksi Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    - b. Seksi Syarat Kerja
  5. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - a. Seksi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pemagangan
    - b. Seksi Lembaga Latihan Swasta dan Produktivitas
  6. Bidang Transmigrasi
    - a. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
    - b. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi
  7. UPTD; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Disnakertrans sebagaimana bagan berikut :

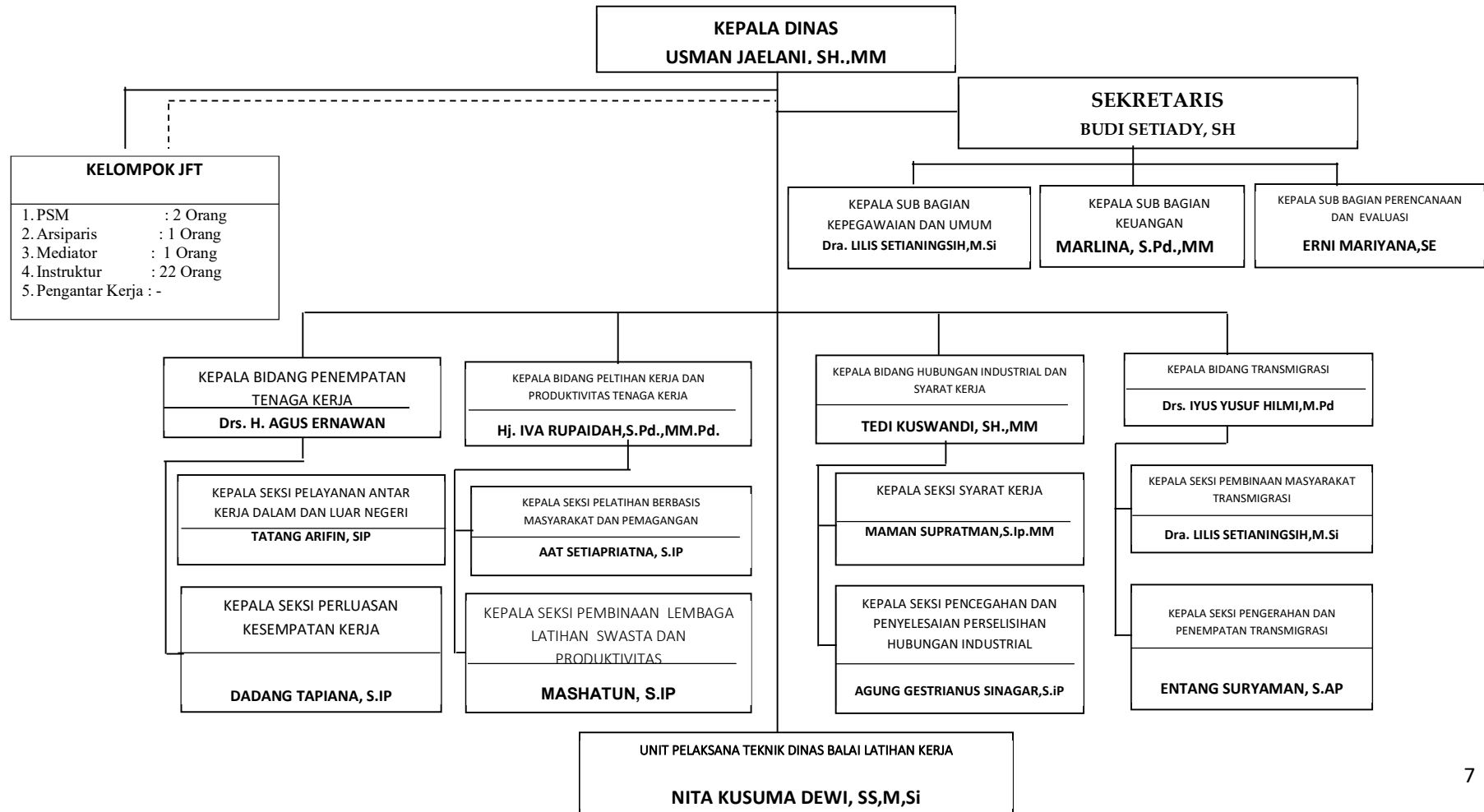


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUKABUMI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 103 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 DESEMBER 2018





### 3. Sumber Daya

#### a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 61 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Pegawai Disnakertrans Kab.Sukabumi  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DINAS	1	-	1
2.	SEKRETARIAT	5	4	9
3.	BIDANG PENEMPATAN	10	1	11
4.	BIDANG HI DAN SYAKER	5	-	5
5.	BIDANG PELATIHAN	2	3	5
6.	BIDANG TRANSMIGRASI	3	1	4
7.	UPTD BLK	21	5	26
TOTAL		<b>47</b>	<b>14</b>	<b>61</b>

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Kab.Sukabumi Tahun 2021

#### I.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2021 mengacu pada :

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan ;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;



17. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 nomor 33 tanggal 15 Oktober 2012;
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30.A Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.I. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 mencakup komponen-komponen **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021 dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja tahun 2021. Uraian dari komponen Rencana Strategis tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

##### Visi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

##### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Tujuan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten

Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur
2. Pencari kerja yang berkompetensi dan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
3. Berkurangnya kasus perselisihan
4. Petani miskin, buruh tani, dan masyarakat yang minat untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi
5. Lokasi transmigrasi yang layak huni dan berkembang

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini :





Tabel 2.1.

Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Eksist- ing (2015)	TARGET						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha	1	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	93.55	93.64	93.75	93.84	93.94	94.05	94.15
	2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	53.60	54.67	55.77	56.88	58.02	59.18	60.36	60.36
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	53.6	54.67	55.77	56.88	58.02	59.18	60.36	60.36
			Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	Orang	140	140	140	140	140	140	140	840
			Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	Orang	80	100	100	100	100	100	100	600
			Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	Orang	160	200	200	200	200	200	200	1200
			Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Orang	180	20	40	40	40	40	40	220
		Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pada tahun berjalan	%	17.3	15	16.2	16.8	17	17.5	17.5	17.50
			Jumlah KK transmigran yang dibina	KK	55	30	30	30	30	30	30	180



## Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri

### MISI

1	2	3	4
<b>Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;</b>	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional	Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

### TUJUAN

### Meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan usaha

### INDIKATOR

1) Tingkat Pengangguran Terbuka 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	3) jumlah Transmigran yang diberangkatkan dan dibina serta translok
--	---

### SASARAN

1) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja 2) Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam potensi daerah;	3) Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok.
--	---

### INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Rasio penduduk yang bekerja
	Pencari Kerja yang ditempatkan
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)
	Jumlah pelatihan kewirausahaan
	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi
	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat
Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)
Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan
	Jumlah KK transmigran dan translok yg dibina



Berdasarkan surat undangan dari BAPPEDA Kabupaten Sukabumi Nomor: 005/589/ PE , Perihal Undangan Kegiatan Review RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021, Tanggal 12 April 2018. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans. Berikut perbandingan Sasaran, tujuan dan Indikator Kinerja untuk Tahun 2021:

Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	
		2	3	4	9	10	11	12
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	7-12	7-12	7-12	7-12
			Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	%	100	100	100	100
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65	65	67	67
			Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial	%	100	100	100,	100
		Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Jumlah KK	10	20	25	55
		Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang dibina	Jumlah KK	30	30	30	90



No.	Sasaran Sebelum Direviu	Sasaran Setelah Direviu	Indikator Kinerja Utama Sebelum Direviu	Indikator Kinerja Utama Setelah Direviu	Target Sebelum di reviu	Target Sesudah di reviu	Satuan Sebelum di reviu	Satuan setelah di reviu
1	2	3	4	5			6	6
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja, Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	- Rasio Penduduk yang Bekerja	- Tingkat pengangguran terbuka	94.05	7-12	%	%
			- Pencari Kerja Yang Ditempatkan		59.18		%	
			- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	- Tingkat partisipasi angkatan kerja	59.18	65	%	%
			- Jumlah Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi (Pelatihan Institusional)	- Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	140	100	Orang	%
			- Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	100		Orang	%
			- Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	-	200		Orang	%
			- Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	- Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100	100	%	%
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Potensi Daerah	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)		40		Orang	%
3	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	- Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan Pada Tahun Berjalan	- Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan Pada Tahun Berjalan	17.5	20	%	KK
			- Jumlah KK Transmigran yang dibina	- Jumlah KK Transmigran yang dibina	30	30	KK	KK

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.



Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2  
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha	1 Tingkat pengangguran terbuka 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi pencari kerja serta melindungi hak-hak pekerja	1) Rasio penduduk yang bekerja 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3) Pencari kerja yang ditempatkan 4) Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional) 5) Jumlah pelatihan kewirausahaan 6) Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	1) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja 2) Meningkatkan kompetensi pencari kerja (pelatihan institusional)	1) Perluasan Kesempatan kerja, yang diikuti dengan pengendalian rasio pekerja laki-laki serta proporsi pekerja dari penduduk sekitar perusahaan 2) Menjalin kerjasama dengan institusi penerima kerja dalam penempatan pencari kerja 3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri 4) LKS Bipartit dan Tripartit
		Masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Jumlah pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dan potensi daerah	Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah	Pelatihan masyarakat berbasis potensi daerah

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
		1) Masyarakat pedesaan yang minat untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi	Jumlah KK transmigran dan translok	Meningkatkan jumlah transmigran serta pengembangan kawasan transmigrasi	1) Peningkatan kerjasama antar wilayah dan pengembangan kawasan transmigrasi 2) Pengerahan dan penempatan transmigran 3) Sosialisasi program transmigrasi 4) Pembinaan dan peninjauan transmigran serta translok





## A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3.  
Indikator Kinerja Utama  
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	1. Rasio penduduk yang bekerja 2. Pencari kerja yang ditempatkan 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional) 5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi 6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat 7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	1. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan. 2. Jumlah KK transmigran yang dibina



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi menyesuaikan Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati tersebut, Berikut ini beberapa perubahan Indikator Kinerja Utamanya:

No	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio penduduk yang bekerja</li> <li>2. Pencari kerja yang ditempatkan</li> <li>3. Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)</li> <li>5. Jumlah pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>6. Jumlah pelatihan berbasis masyarakat</li> <li>7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial</li> </ol>	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>2. Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi</li> <li>3. Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>4. Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial</li> </ol>
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan dalam pengelolaan potensi daerah	Jumlah masyarakat pedesaan dalam memberdayakan potensi daerah (pelatihan non institusional)		
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan.</li> <li>2. Jumlah KK transmigran yang dibina</li> </ol>	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan.</li> <li>2. Jumlah KK transmigran yang dibina</li> </ol>

## II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun



sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel.2.4.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja, Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>- Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi</li> <li>- Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>- Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial</li> </ul>	<p>7-12%</p> <p>100%</p> <p>67%</p> <p>100%</p>
2.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran dan Translok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan</li> <li>- Jumlah KK transmigran yang dibina</li> </ul>	<p>30 KK</p> <p>30 KK</p>

No	Program	Anggaran
1.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 424.450.500,00-
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 656.484.980,00-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.016.722.700,00-
4.	Hubungan Industrial	Rp. 342.866.250,00-
5.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 305.307.000,00-
6.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 1.780.000,00-
7.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.174.311.580,00-



---

#### **A. Rencana Aksi**

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, maka perlu adanya rencana aksi pencapaian target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan, namun karena mengalami perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021, sehingga pencapaian target kinerja menjadi tidak optimal dalam beberapa target capaian kinerja. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan dalam table 2.5.



Tabel 2.5.

**Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Per-Triwulan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Kegiatan	Target Anggaran Triwulan					Ket.
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	7-12%	Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Rencana Tenaga Kerja	1 Unit	-	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	328.140.000	130.087.500	2.685.000	3.580.000	464.492.500	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										1 Dokumen	-	-	-							
										5 BKK	5 BKK	5 BKK	5 BKK		2.488.000	2.106.000	2.813.000	3.531.000	10.938.000	
										616 Orang	-	-	-		1.457.694.400	14.598.000	-	-	1.472.292.400	
										2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang		3.848.000	2.652.000	4.942.000	3.558.000	15.000.000	
										30 Orang	-	100 Orang	-		46.200.000	21.675.000	81.351.000	29.314.400	178.540.400	
										-	120 Orang	-	-		25.026.500	680.453.620	29.070.000	-	734.550.120	
							Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penerbitan Perpanjangan IMTA	-	-	-	50 Perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.604.000	6.563.000	15.656.000	22.741.000	47.564.000	
		Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	48%	42%	10%	-	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya Kompetensi Peserta Yang Dilatih	-	80 Orang	-	-	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.884.000	506.274.200	-	-	513.158.200	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	25 Orang	-	-	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.653.540	7.636.000	6.377.000	-	39.666.540	
							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	50 Orang	2 Perusahaan	-	2 Perusahaan	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	92.742.240	16.552.500	104.634.640	5.339.200	219.268.580	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Kegiatan	Target Anggaran Triwulan					Ket.
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	12%	61%	18%	9%	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan	15 Perusa haan	10 Perusa haan	-	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	12.656.500	9.644.500	64.500	64.500	22.430.000	Bid. Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	24 Kasus	200 Perusa haan	-	41 Orang	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.110.000	174.195.000	77.085.000	45.610.000	346.000.000	
										5 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdamp ak Pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.450.000	82.788.000	88.259.000	88.248.000	281.745.000	
										-	-	50 Serikat Pekerja	-	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	11.433.750	10.900.750	20.438.750	7.226.750	50.000.000	
										-	28 Orang	-	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	14.260.000	37.530.000	17.650.000	30.560.000	100.000.000	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Kegiatan	Target Anggaran Triwulan					Ket.
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	-	-	-	30 KK	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Meningkatnya Jumlah KK Transmigran yang diberangkatkan	-	1 MoU	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi	-	20.000.000	-	-	20.000.000	Bidang Transmigrasi
										-	-	1 Lokasi	-	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	-	3.199.000	21.801.000	-	25.000.000	
										-	-	-	5 KK	Pemindahan dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	712.000	1.424.000	1.892.000	23.472.000	27.500.000	
										5 Lokasi	-	-	-	Penyuluhan Transmigrasi	266.235.000	26.934.000	6.419.000	7.912.000	307.500.000	
							Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahapan Kemandirian	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Meningkatnya Satuan Pemukiman Transmigran	-	-	30 Orang	-	Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	1.780.000	539.000	8.401.000	1.780.000	12.500.000	
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.098.000	7.101.400	6.930.100	6.523.400	56.652.900	Sekretariat
										100 Jenis	4 Bulan	4 Bulan	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.736.470	39.100.739	16.350.000	-	143.187.209	
										4 Bulan	12 Bulan	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.713.900	12.415.600	12.415.600	11.419.600	149.964.700	
										3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	2 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.864.000	48.678.000	22.246.000	14.832.000	125.620.000	
		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	-	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	23 Unit	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.876.100	-	-	-	199.876.100	
		Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.981.000	312.881.000	249.381.000	248.577.400	1.058.820.400	





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Kegiatan	Target Anggaran Triwulan					Ket.
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	18	19	20	21
		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.290.000	81.290.000	81.270.000	47.250.000	291.100.000	
										24 Unit	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.101.200	56.051.300	56.672.600	49.734.900	216.560.000	
		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	3 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.193.630.572	2.903.797.534	2.268.297.466	1.885.658.242	9.251.383.814	Keuangan
										3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.502.000	5.356.000	6.750.000	5.792.000	-	
										1 Laporan	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.196.000	-	-	-	8.196.000	
										-	1 Laporan	-	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.625.000	7.375.000	-	-	10.000.000	
										3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.815.000	7.815.000	7.815.000	7.813.000	31.258.000	
										-	1 Laporan	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	10.000.000	-	-	10.000.000	
		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kerja	3 Dokumen	-	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.909.650	2.402.000	6.693.650	8.632.000	26.637.300	Perencanaan dan Evaluasi
										1 Dokumen	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.232.000	-	-	-	6.232.000	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Kegiatan	Target Anggaran Triwulan					Ket.
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										-	-	1 Dokum en	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	-	2.674.000	3.558.000	6.232.000	
										1 Dokum en	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	9.465.000	-	-	-	9.465.000	
										-	-	-	1 Dokum en	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	-	-	3.924.000	5.541.000	9.465.000	
										-	-	-	1 Dokum en	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.604.000	5.317.000	6.803.000	3.351.000	20.075.000	
										-	-	-	2 Dokum en	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.310.000	7.310.000	11.930.000	10.900.000	34.450.000	



## II.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Tabel. 2.6.  
Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan  
Kegiatan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi

Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan									
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan usaha	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7-12	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp. 464,492,500	Rp. 463,092,500	Rp. 424,450,500
		Meningkatnya Kompetensi Peserta Yang Dilatih	%	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 513,158,200	Rp. 513,158,200	Rp. 512,858,200
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 39,666,540	Rp. 34,744,540	Rp. 34,744,540



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwasasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 219,268,580	Rp. 146,947,440	Rp. 108,882,240
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7-12	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,483,230,400	Rp. 1,458,961,900	Rp. 1,450,912,900
						Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 978,090,520	Rp. 660,502,600	Rp. 563,251,300
						Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47,564,000	Rp. 10,952,000	Rp. 2,558,500



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22,430,000	Rp. 22,430,000	Rp. 19,245,250
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 546,000,000	Rp. 432,584,000	Rp. 323,621,000



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	30	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Rp. 380,000,000	Rp. 320,593,000	Rp. 305,307,000
		Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	KK	30	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12,500,000	Rp. 1,780,000	Rp. 1,780,000
		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 112,556,300	Rp. 68,144,300	Rp. 55,197,500



Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Daerah	Rp. 9,337,237,814	Rp. 8,301,130,751	Rp. 8,860,179,271
		Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 475,424,809	Rp. 446,599,809	Rp. 521,751,309
		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 199,876,100	Rp. 199,876,100	Rp. 224,764,700
		Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1,058,820,400	Rp. 1,058,820,400	Rp. 1,063,758,800





Misi : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Melalui Bidang Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Anggaran		
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocussing	Perubahan
		Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 507,660,000	Rp. 507,660,000	Rp. 448,660,000



Tabel. 2.7.  
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran			% Anggaran
		Pagu Murni	Refocussing	Perubahan	
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat pengangguran terbuka	783.245.100	357.876.600	1.860.977.400	
	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	1.082.729.800	12.066.000	212.066.000	
	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	850.734.900	582.325.000	582.325.000	
Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	129.299.800	58.150.000	58.150.000	
	Jumlah KK transmigran yang dibina	78.350.000	22.721.000	22.721.000	



---

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **III.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



## 1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

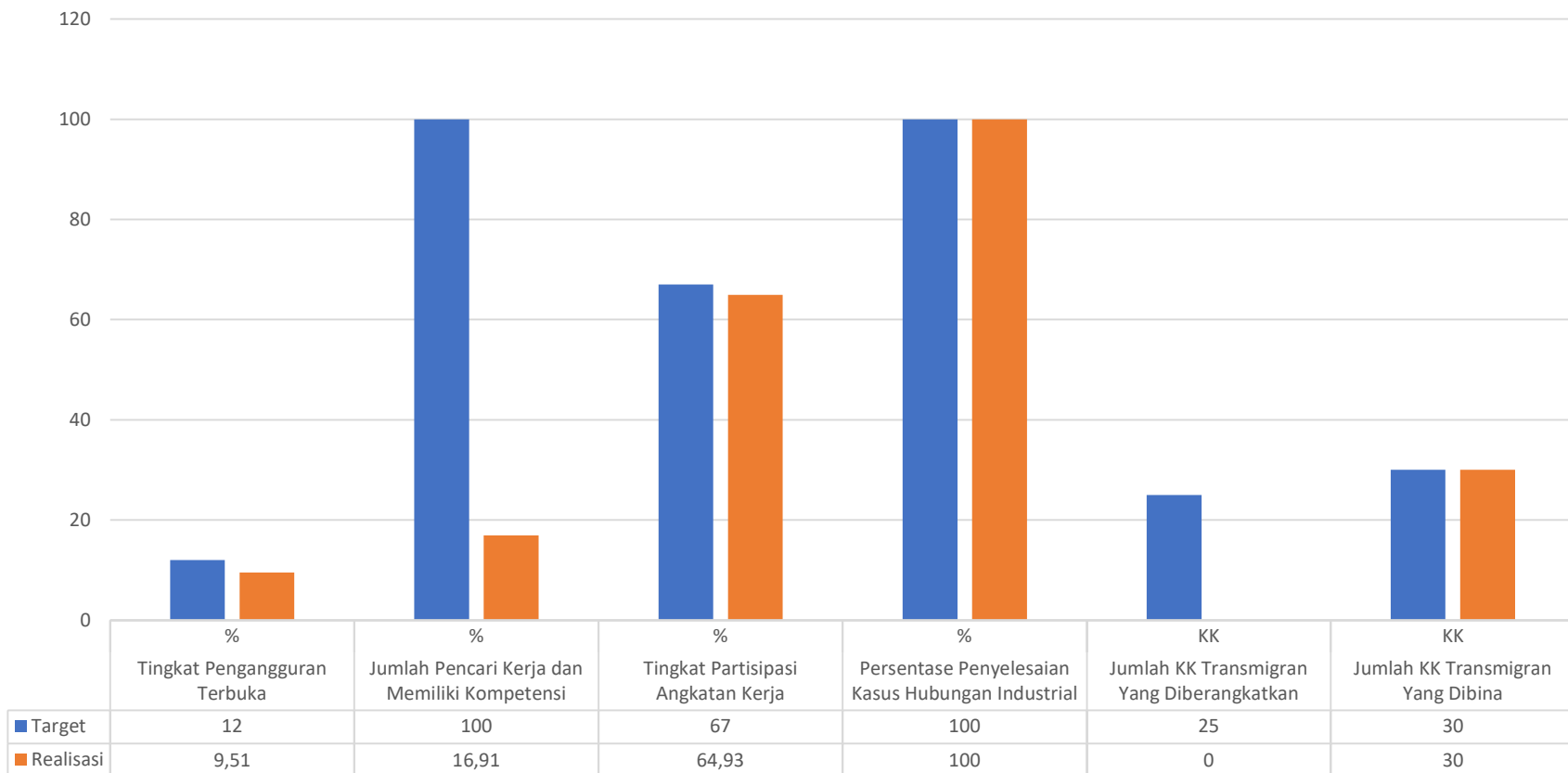
Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7-12	9,51	79,25
	Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi	%	100	16,91	16,91
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,00	64,93	96,91
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	100	100
Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	25	0	0
	Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	KK	30	30	100



Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021





## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Beberapa Tahun Terakhir

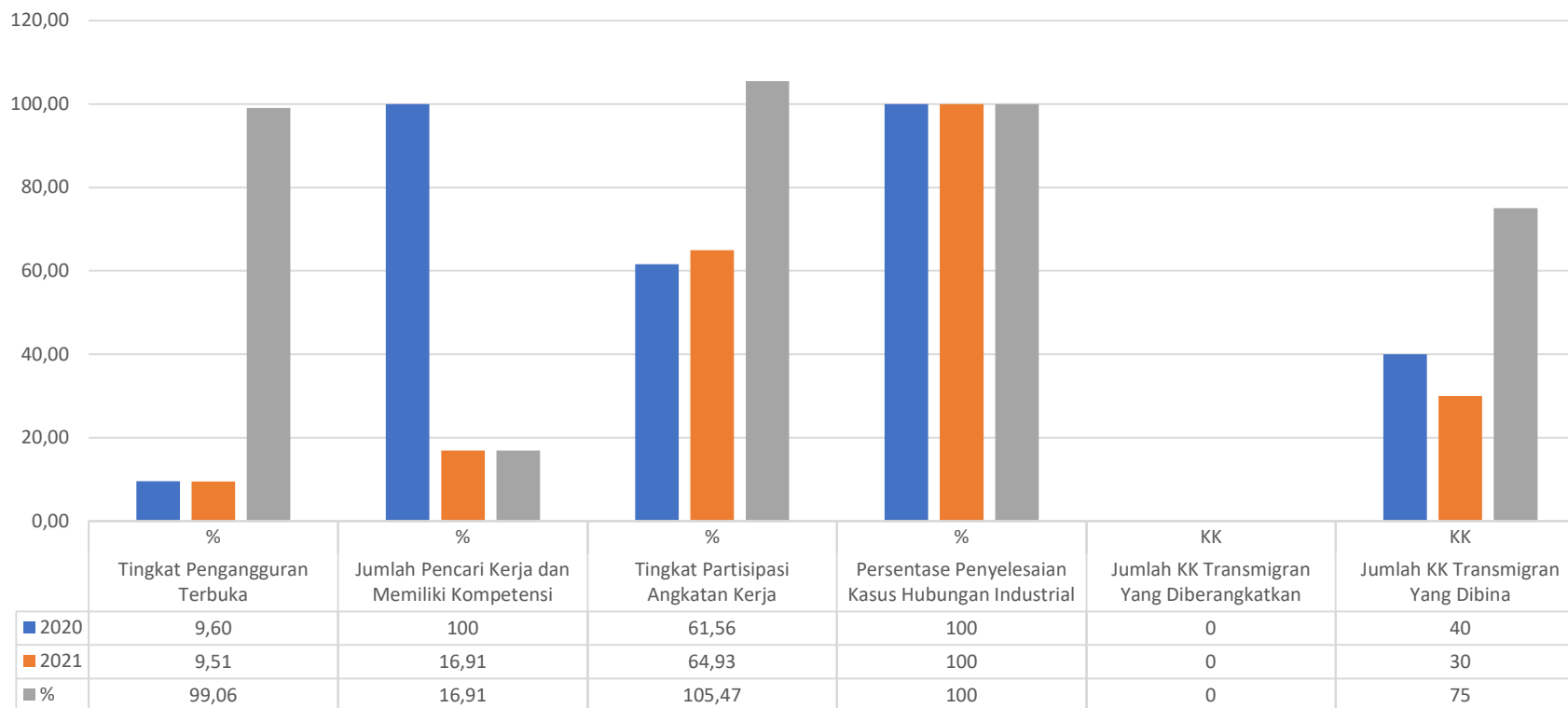
Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		% Capaian
			2020	2021	
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,60	9,51	99,06
	Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi	%	100	16,91	16,91
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,56	64,93	105,47
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	100	100
Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	0	0	0
	Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	KK	40	30	75



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2021





**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

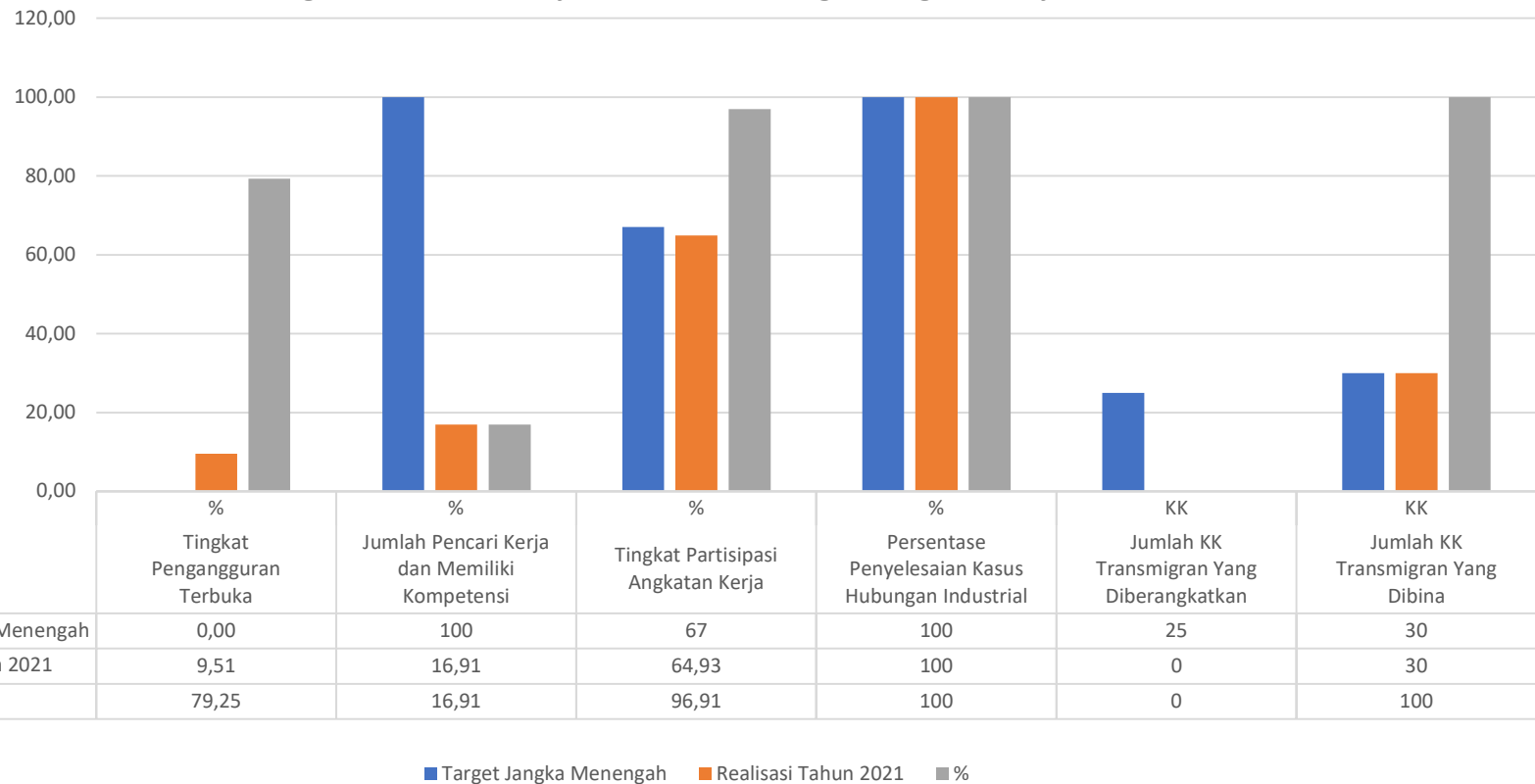
Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target  
Kinerja Renstra PD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2021	%
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7-12	9,51	79,25
	Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi	%	100	16,91	16,91
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67	64,93	96,91
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	100	100
Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	25	0	0
	Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	KK	30	30	100





**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Kinerja Renstra PD**





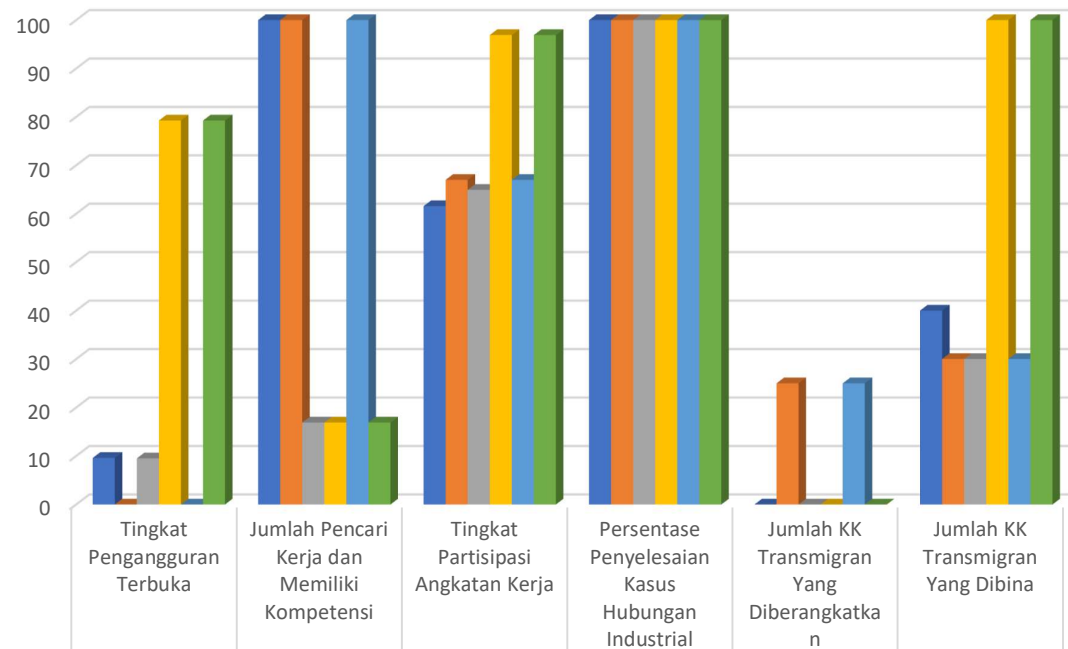
#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,6	7-12	9,51	79,25	7-12	79,25
	Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi	100	100	16,91	16,91	100	16,91
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,56	67	64,93	96,91	67	96,91
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	0	25	0	0	25	0
	Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	40	30	30	100	30	100



**Pencapaian Kinerja Tahun 2021**



■ Capaian Tahun Sebelumnya (2020)	9,6	100	61,56	100	0	40
■ Target Tahun 2021	0,00	100	67	100	25	30
■ Realisasi Tahun 2021	9,51	16,91	64,93	100	0	30
■ % Realisasi 2021	79,25	16,91	96,91	100	0	100
■ Target Akhir Renstra	0	100	67	100	25	30
■ Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)	79,25	16,91	96,91	100	0	100



Dari table 3.4 dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2021 mencapai angka realisasi sebesar 9,51 % dengan persentase terhadap target 7-12 yaitu sebesar 79,25%. Angka ini menunjukkan penurunan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi walaupun angkanya tidak signifikan, selain disebabkan oleh pandemik Covid-19 yang masih ada walaupun sudah mulai menurun kasusnya.
- Untuk Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak mencapai target dengan realisasi 64,93% dari target 67%, akan tetapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 61,56 %. Hal ini disebabkan masih adanya pandemi Covid-19 yang masih ada walaupun sudah menurun kasusnya, serta sudah mulai banyak kembali lowongan kerja yang tersedia.
- Untuk Indikator yang dianggap berhasil yaitu Persentase Penyelesaian kasus Hubungan Industrial persentase sebesar 100% dari target, Walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19 dan segala keterbatasan komunikasi, mengingat tanggung jawab dan tupoksi yang harus tetap dilaksanakan, kegiatan untuk mendukung kinerja indikator ini tetap dilaksanakan oleh pihak Disnakertrans, walaupun tanpa anggaran karena terkena *refocussing*.
- Secara umum capaian untuk Indikator kinerja baik dengan capaian rata-rata di atas 90 %, kecuali untuk indikator jumlah KK transmigran yang diberangkatkan, capaian 0 (nol) % disebabkan adanya surat edaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 128 PP.04.31 perihal Penjelasan Penghentian Program Transmigrasi reguler / keluar pulau Jawa.

Pencapaian kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui 6 ( enam ) program dan 1 (satu) program penunjang dengan 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2021, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya se-optimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yang merupakan janji dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu 2 semester pada tahun anggaran 2021, target indikator sasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terdapat 3 sasaran dengan indikator kinerja. Walaupun, seperti diketahui bahwa seluruh anggaran kegiatan terkena *Refocussing* dan Realokasi anggaran di tahun 2021.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Satuan	Target	Program	Kegiatan
Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan usaha	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Satuan	Target	Program	Kegiatan
		Meningkatnya Kompetensi Peserta Yang Dilatih	%	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota
						Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota
						Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Satuan	Target	Program	Kegiatan
	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	KK	0	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian
		Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	KK	30	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### III.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran tahun 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7  
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			Realisasi	% Realisasi
			Pagu Murni	Refocussing	Perubahan		
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja dan Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 464,492,500	Rp. 463,092,500	Rp. 424,450,500	Rp. 411.262.000	96,89%
		Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.508.884.920	Rp. 2.130.416.500	Rp. 2.016.722.700	Rp. 2.003.260.500	99,33%
	Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 772,093,320	Rp. 694,850,180	Rp. 656,484,980	Rp. 655.436.480	99,84%
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Hubungan Industrial	Rp. 568,430,000	Rp. 455,014,000	Rp. 342,866,250	Rp. 342.598.250	99,92%
Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok	Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan	Pembangunan Kawasan Trasn migrasi	Rp. 380,000,000	Rp. 320,593,000	Rp. 305,307,000	Rp. 303.985.000	99,57%
	Jumlah KK Transmigran Yang Dibina	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 12,500,000	Rp. 1,780,000	Rp. 1,780,000	Rp. 1,780,000	100%







Berdasarkan tampilan data Realisasi kinerja dan anggaran pada table 3.7, penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi cukup baik dengan rata-rata angka persentase 99,26 % untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan, Realisasi penyerapan anggaran terendah ada pada program perencanaan tenaga kerja dengan angka 96,89 %, lalu pencapaian program tersebut pada table 3.4 ataupun pada table 3.6, angka capaian programnya dengan indikator kinerjanya tingkat pengangguran terbuka dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja berada diangka 79.25%, dan ini perlu ditingkatkan kembali untuk kedepannya.

Adapun untuk penyerapan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan angka presentase realisasi anggaran mencapai 99,84%, Salah satu program dengan indikator kinerjanya adalah jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi dengan sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak Hak Pekerja, selain itu program ini juga menjadi sasaran strategis. Untuk Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Penyerapan anggaran 100% tetapi dihitung terhadap anggaran terakhir setelah *Refocussing*.

Secara umum pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah cukup baik, dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap Target Renstra Kabupaten Sukabumi, baik terhadap target Renstra tahun berjalan ataupun Target Renstra untuk tahun 2016-2021.



---

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

#### IV.1 KESIMPULAN

##### IV.1.1 Keberhasilan

Secara keseluruhan Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan capaian kinerja dinilai sangat baik dan meningkat, diantaranya :

1. Sudah adanya Aplikasi *Silent Center* di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *Sisnaker*, agar para pencari kerja bisa lebih mudah dalam membuat AK.1 (Kartu Kuning) serta mencari lowongan pekerjaan. Sehingga diharapkan bisa menekan angka tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan angka tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi.

##### IV.1.2 Kendala dan Hambatan

1. Masih adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), sangat berdampak terhadap semua kegiatan sehari-hari hampir di semua sektor secara umum, termasuk pada program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Masih rendahnya SDM Tenaga Kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Sukabumi dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan formal;
3. Masih Kurangnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan calon TKI ke Luar Negeri;



4. Masih kurangnya animo masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti program transmigrasi ke luar pulau Jawa;
5. Masih rendahnya tingkat kompetensi pencari kerja untuk masuk dunia Usaha dan Kerja.
6. Keterbatasan anggaran pada sehingga kurang maksimalnya pencapaian pada program dan kegiatan yang ada, terutama dalam kegiatan perluasan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BLK.
7. Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang menimbulkan pro-kontra dan banyak yang menentang terutama dari kaum buruh/pekerja, sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang mengakibatkan produksi perusahaan terganggu.

#### **IV.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

##### **Strategi Penyelesaian Masalah**

1. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan Koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan diperlukan etos kerja yang tinggi.
3. Dalam menyalurkan tingginya animo masyarakat bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, dilakukan kegiatan menjalin kerja sama dengan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penempatan/penerima transmigrasi.
4. Meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
5. Untuk mengantisipasi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



---

melaksanakan pembinaan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK ).

Demikianlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Disnakertrans Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.

Sukabumi, 31 Desember 2021  
Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**USMAN JAELANI, SH., MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001



# LAMPIRAN





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USMAN Jaelani, SH., MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Marwan Hamami, MM**

Jabatan : **BUPATI SUKABUMI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palabuhanratu,

2021

Pihak Kedua,

**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Pihak Pertama,

**USMAN Jaelani, SH., MM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja, Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak-hak Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>- Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi</li> <li>- Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>- Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial</li> </ul>	7-12 %  100%  67%  100%
2.	Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan Dan Terbinanya Transmigran dan Translok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan</li> <li>- Jumlah KK transmigran yang dibina</li> </ul>	30 KK  30 KK

No	Program	Anggaran
1.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 424.450.500,00,-
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 656.484.980,00,-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.016.722.700,00,-
4.	Hubungan Industrial	Rp. 342.866.250,00,-
5.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 305.307.000,00,-
6.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 1.780.000,00,-
7.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.174.311.580,00,-

Bupati Sukabumi

**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Kepala Dinas

**USMAN JAELANI, SH., MM**



